BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Kusumohamidjojo, dalam Sitepu, mengatakan bahwa hubungan internasional yang secara harfiah, dapat kita terjemahkan sebagai suatu hubungan antar bangsa (politik, ekonomi, hukum, diplomasi), namun aspek politik dan hukum merupakan dua aspek yang dominan. Aspek politik, sebagai aspek material (kepentingan militer, ekonomi, dan kebudayaan) sedangkan aspek hukumnya menjadikannya sebagai aspek formal dalam artian merupakan bentuk atas penyelesaian prosedural dari berbagai kepentingan (Sitepu, 2011: 20).

Hubungan Internasional muncul ketika adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi ke dalam wilayah-wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara – negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia, yang kemudian negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang menjadi sebuah sistem global (Jackson & Sorensen, 2009: 2). Dalam buku Pengantar ilmu hubungan internasional Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani menyatakan: Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor yang melewati batas-batas Negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat dari adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu Negara yang

menutup diri terhadap dunia luar. (Perwita & Yani, 2005: 3-4). Jackson dan George & Sorensen juga mengatakan, bahwa "Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependensi perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak – hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya" (Jackson dan Sorensen, 2009: 34).

Studi Hubungan Internasional menurut McClelland dalam Perwita & Yani merupakan suatu studi tentang interaksi antar jenis-jenis kekuatan sosial tertentu dimana di dalamnya terdapat studi tentang keadaan-keadaan yang relevan yang mengelilingi interaksi tersebut. Interaksi yang dilakukan oleh aktor-aktor hubungan internasional dilandasi oleh adanya sumber daya yang melekat pada tiap-tiap aktor tersebut (Perwita dan Yani, 2005: 4).

Hubungan internasional berkembang bersamaan dengan seiring perkembangan zaman yang semakin maju dengan berbagai macam teknologi yang diciptakan menyebabkan studi hubungan internasional menjadi semakin kompleks. Kompleksitas hubungan internasional itu sesuai dengan pendapat Jack C. Plano yang mengatakan bahwa hubungan internasional mencakup hubungan antar negara atau sebagai interaksi para aktor yang tindakan serta kondisinya dapat menimbulkan konsekuensi terhadap aktor lainnya untuk memberikan tanggapan.

Para pengamat aliran tradisionalis menyatakan bahwa Hubungan Internasional adalah studi mengenai pola-pola aksi dan reaksi di antara negara-negara berdaulat yang diwakili oleh elit-elit pemerintahan (Couloumbis & Wolfe, 2004: 33). Sedangkan menurut Stanley Hoffman, Hubungan Internasional adalah studi sistematis mengenai fenomena yang bisa diamati yang mencoba menemukan variabel-variabel dasar untuk menjelaskan perilaku dan untuk mengungkapkan karakteristik tipe-tipe hubungan antara unit-unit nasional (Hoffman, 2007: 35).

J.David Singer dalam bukunya "*The Behavioral Science Apporoach to Interational Relations*" mengartikan Hubungan Internasional sebagai sekumpulan generalisasi empiris yang secara internal konsisten dan memiliki kemampuan yang bersifat deskriptif (menerangkan), prediktif (meramalkan), dan eksplanotory (menjelaskan) (Couloumbis dan Wolfe, 2004: 40).

Ilmu Hubungan Internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (Djelantik, 2008: 10). Stanley Hoffman mengartikan Hubungan Internasional sebagai subjek akademis terutama dalam memperhatikan hubungan antarnegara (Hoffman, 2007: 16). Pada dekade 1980-an studi hubungan internasional adalah studi tentang interaksi yang terjadi antara negara-negara yang berdaulat didunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya juga memberikan pengaruh terhadap kehidupan negara bangsa artinya ilmu Hubungan Internasional mengacu pada segala aspek bentuk interaksi yang melampaui batas-batas negara (Perwita dan Yani, 2005: 3).

Hubungan Internasional bukan hanya mencakup hubungan antar negara atau antar pemerintah secara langsung namun juga meliputi berbagai transaksi

ekonomi dan perdagangan, strategi atau penggunaan kekuatan militer, serta langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah maupun non-pemerintah. Holsti berpendapat bahwa Hubungan Internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori pemerintah maupun tidak. Hubungan Internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses politik antar bangsa, tetapi dengan memperhatikan seluruh segi hubungan itu (Holsti, 2006: 29).

Hubungan Internasional juga didefinisikan sebagai ilmu untuk memahami sebab-sebab terjadinya konflik dan untuk membina dunia yang lebih damai. Dalam "*The Dictionary of World Politics"* mengartikan Hubungan Internasional sebagai seluruh interaksi aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara (Kurian, 2002: 27). Hubungan Internasional dapat pula didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi (Mas'oed, 2004: 37).

2.1.2 Hubungan Luar Negeri

Interaksi antar aktor dalam studi hubungan internasional bisa berbentuk hubungan bilateral, dan multilateral. Perwita berpendapat bahwa interaksi dapat dibedakan berdasarkan atas: "Berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan interaksi, intensitas interaksi, serta pola interaksi yang terbentuk, dan di dalam hubungan internasional, interaksi yang terjadi antar aktor dapat dikenali karena intensitas keberulangannya sehingga membentuk suatu pola tertentu, sedangkan bentuk-bentuk interaksi berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan hubungan,

antara lain dibedakan menjadi hubungan bilateral, trilateral, regional, dan multilateral/internasional" (Perwita & Yani, 2005: 42).

Bentuk-bentuk interaksi inilah yang disebut dengan hubungan luar negeri. Adapun yang dimaksud dengan hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik di antara dua pihak. Hubungan luar negeri ini meliputi interaksi yang menggambarkan suatu pola hubungan aksi dan reaksi. Adapun Hubungan aksi reaksi ini melalui proses sebagai berikut:

1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
2. Persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Respon atau aksi balik dari negara penerima.
4. Persepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa. (Perwita & Yani, 2005: 42).

2.1.3 Politik Internasional

Salah satu kajian dalam Hubungan Internasional adalah Politik Internasional yang mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*) (Perwita & Yani, 2005: 39). Politik internasional dapat dipahami sebagai bagian dari hubungan internasional, walau terminologi hubungan internasional, politik dunia, politik internasional sering digunakan secara sinonim (Viotti & Kauppi, 2012: 483). Menurut C.J. Johari ruang lingkup Hubungan Internasional meliputi seluruh tipe hubungan atau

interaksi antar negara, termasuk asosiasi dan organisasi non-pemerintah (ekonomi, pariwisata, perdagangan, dsb). Sedangkan ruang lingkup Politik Internasional hanya terbatas pada "*power game*" yang melibatkan negara-negara berdaulat (Johari, 2009: 9).

Menurut Holsti studi Politik Internasional adalah studi mengenai pola tindakan negara terhadap lingkungan sebagai reaksi atas respon negara lain. Selain mencakup unsur power, kepentingan, dan tindakan, politik internasional juga mencakup perhatian terhadap sistem internasional dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi konflik. Jadi politik internasional menggambarkan hubungan dua arah (reaksi dan respon) bukan aksi (Holsti, 2006: 38).

Perbedaan antara politik internasional dan politik luar negeri adalah, politik internasional mengkaji pola-pola yang berlaku dalam hubungan internasional, perilaku negara-negara serta para pembuat keputusan dalam situasi damai dan situasi konflik, serta melihat tingkah laku atau tindakan masing-masing negara dalam pola aksi - reaksi. Sedangkan politik luar negeri menganalisis bagaimana seharusnya tindakan atau langkah suatu negara terhadap kondisi serta perkembangan pada lingkungan eksternal (Rudy, 2002: 15).

Menurut Howard Lentner dalam bukunya "*Foreign Policy Analysis*", Politik internasional merupakan salah satu wujud dari interaksi dalam hubungan internasional. Politik internasional membahas keadaan politik di masyarakat internasional dalam artian lebih sempit, yaitu dengan berfokus pada diplomasi, hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya, dengan kata lain

politik internasional adalah proses interaksi antara dua negara atau lebih (Perwita & Yani, 2005: 39).

Secara umum, objek dalam politik internasional juga merupakan objek dari politik luar negeri. Suatu analisis mengenai tindakan terhadap lingkungan eksternal serta berbagai kondisi domestik yang menopang formulasi tindakan merupakan kajian politik luar negeri, dan akan menjadi kajian politik internasional apabila tindakan tersebut dipandang sebagai salah satu pola tindakan suatu negara serta reaksi atau respon oleh negara lain. Pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran tetapi dapat juga merupakan limpahan dari suatu tindakan tertentu. Kemudian, dalam interaksi antarnegara, interaksi dilakukan didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara (Perwita & Yani, 2005: 41).

Dalam politik internasional proses interaksi berlangsung dalam suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interrelasi serta interplay (saling mempengaruhi) antara aktor dengan lingkungannya atau sebaliknya. Istilah politik internasional pada dasarnya merupakan istilah tradisional yang sangat menekankan interaksi para aktor negara. Namun, pola-pola interaksi politik dalam hubungan internasional kini sudah melibatkan interaksi antar aktor negara dengan aktor non-negara.

Terdapat suatu penggambaran tiga arena politik internasional, yaitu: global, region, dan nation-state yang memberikan dasar struktrur analitis untuk pertimbangan politik internasional. Di dalam politik internasional, sebuah sistem merupakan keseluruhan hubungan yang berlangsung diantara unit-unit yang

mempunyai kuasa di dalam arena khusus, ada tiga arena yang mewakili tiga sistem tersebut, yaitu:

1. Sistem dominan (*the dominant system*) yang berada di arena global, merupakan konfrontasi yang paling kuat dari negara-negara.
2. Sistem subordinat (*the subordinate system*) yang berada di suatu region, merupakan keseluruhan interaksi hubungan-hubungan diantara region tersebut.
3. Sistem internal (*the internal system*) yang berada di suatu negara (bangsa), merupakan keseluruhan hubungan-hubungan organisasi yang tersusun di dalam suatu politik domestik (Jemadu, 2008: 32).

2.1.4 Politik Luar Negeri

Dalam suatu proses politik internasional yang melibatkan hubungan antar aktor negara dan non-negara didalamnya, dibutuhkan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh aktor-aktor tersebut sebagai representasi dari kepentingan masing-masing aktor yang kemudian saling bertemu. Dalam hubungan internasional khususnya hubungan antar negara hal ini disebut Politik Luar Negeri. Hal ini merupakan studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek internasional tapi juga aspek-aspek eksternal suatu negara (Rosenau, 2006: 17).

Pengertian dasar dari Politik luar negeri ialah "*action theory*", atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara teori politik luar negeri adalah seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara. Politik luar

negeri merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk mempertahankan atau memajukan kepentingan nasional dalam percaturan dunia internasional, melalui suatu strategi atau rencana dibuat oleh para pengambil keputusan yang disebut kebijakan luar negeri (Perwita & Yani, 2005:47-48).

Sedangkan politik luar negeri ”Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri” merupakan iringan kebijaksanaan disertai rentetan tindakan yang rumit tetapi dinamis, yang ditempuh oleh negara itu dalam hubungannya dengan negara-negara lain atau sebagai kegiatannya dalam organisasi-organisasi regional dan internasional (Yusuf, 2009: 123).

Politik luar negeri terdiri dari dua elemen, yaitu tujuan nasional yang akan dicapai dan alat-alat untuk mencapainya. Interaksi antara tujuan nasional dengan sumber-sumber untuk mencapainya merupakan subjek kenegaraan yang abadi (Crabb Jr. dalam Couloumbis & Wolfe, 2004: 126). Adapun keputusan-keputusan dalam politik luar negeri terdiri dari tiga kategori utama, yaitu:

1. Keputusan yang bersifat pragmatis (terencana) adalah keputusan besar yang mempunyai konsekuensi jangka panjang; membuat studi lanjutan, pertimbangan dan evaluasi yang mendalam mengenai seluruh opsi alternatif.
2. Keputusan yang bersifat krisis adalah keputusan yang dibuat selama masa-masa terancam berat; waktu untuk menanggapinya terbatas; dan ada elemen yang mengejutkan yang membutuhkan respon yang telah direncanakan sebelumnya.

3. Keputusan yang bersifat taktis adalah keputusan penting biasanya bersifat pragmatis; memerlukan revaluasi, revisi dan pembalikan (Couloumbis & Wolfe, 2004: 12).

Keputusan-keputusan dalam politik luar negeri dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu penilaian masalah, perhitungan biaya atau risiko, aspek domestik: konsensus, informasi kurang lengkap, tekanan waktu, gaya nasional, komitmen dan hal yang mendahului.

1. Penilaian masalah

Suatu unsur yang amat penting dalam analisis masalah adalah pemilihan awal sasaran yang ingin dicapai. Ini merupakan inti dari strategi yang berupa suatu rencana penggunaan sumber-sumber untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dalam tingkat politik luar negeri, rencana semacam itu disebut strategi nasional.

2. Perhitungan biaya atau risiko

Perhitungan biaya atau risiko merupakan faktor yang mempengaruhi suatu keputusan politik luar negeri, karena tidak ada negara yang dapat melakukan politik luar negeri bisa terbebas dari hal ini yaitu pembatasan jumlah sasaran, dan terbatasnya jumlah pilihan alternatif yang tersedia.

3. Aspek domestik: konsensus

Semua negara tanpa memandang bentuk pemerintahan dan falsafah politiknya terikat oleh konsensus rakyat dan dibatasi oleh sikap masyarakat.

4. Informasi kurang lengkap

Dalam politik luar negeri, informasi yang kurang lengkap antara lain disebabkan oleh kelambanan pembuat keputusan dalam mengejar peristiwa yang cepat berubah sebelum fakta-fakta yang ada lengkap terkumpul. Karena itu informasi seadanya akan dijadikan dasar untuk mengurangi resiko seminimal mungkin. Informasi tidak lengkap mempunyai dua arti yaitu kekurangan data atau terlalu banyak data. Kurangnya data disebabkan lambatnya informasi dan bila tidak dapat menunggu, maka pembuat keputusan akan mengisinya dengan estimate atau perkiraan. Bilamana terlalu banyak data, maka informasi yang diperlukan terkubur dalam tumpukan data dan memerlukan waktu unuk menemukannya sedangkan waktu mendesak untuk mengambil keputusan.

5. Tekanan waktu

Berbagai peristiwa terjadi dengan cepat dan hasil-hasilnya jauh lebih cepat diketahui, sehingga banyak para pembuat keputusan politik luar negeri menghadapi masalah waktu yang diperlukan untuk dapat berpikir tepat dan akan kehilangan mutu pemahaman dan keluwesan yang diperlukan dalam mengambil keputusan.

6. Gaya nasional

Gaya nasional merupakan tradisi dan citra masyarakat yang mengharap para pejabatnya melaksanakan dan mengambil keputusan secara khusus sesuai dengan kehendaknya. Gaya nasional adalah hal yang penting dalam proses pembentukan pola analisis dari pembuat keputusan itu sendiri.

7. Komitmen dan hal yang mendahului

Faktor terakhir yang mempengaruhi keputusan adalah struktur dari komitmen dan peristiwa yang mendahului sebelum keputusan dibuat. Dengan cara yang berbeda, semua negara atau aparatur pembuat keputusan dan individu-individu pembuat keputusan pasti terikat oleh masa lampaunya yang lama ataupun yang baru berlalu (Korany, 2001: 65).

Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu:

a. Nilai, yang menjadi tujuan para pembuat keputusan.
b. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan adanya tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
c. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lainnya. (Holsti, 2006: 190).

Selain itu menurut Holsti, paling sedikit ada empat kondisi atau variabel yang mampu menopang pertimbangan elit pemerintah dalam pemilihan strategi politik luar negeri, yaitu:

a. Struktur sistem internasional, yaitu suatu kondisi yang di dalamnya terdapat pola-pola dominasi, sub ordinasi, dan kepemimpinan.
b. Strategi umum politik luar negeri berkaitan erat dengan sifat kebutuhan sosial-ekonomi domestik dan sikap domestik.
c. Persepsi elit pemerintah (pembuat UU) terhadap tingkat ancaman eksternal.

d. Lokasi geografis,karakteristik, topografis, dan kandungan sumber daya alam yang dimiliki negara (Holsti, 2006: 133-134).

Secara lebih lanjut politik luar negeri memiliki sumber-sumber utama yang menjadi input dalam perumusan kebijakan luar negeri:

a. Sumber sistemik, yaitu sumber yang berasal dari lingkungan eksternal seperti hubungan antar negara, aliansi, dan isu-isu area.
b. Sumber masyarakat, merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal suatu negara sperti dari budaya, sejarah, ekonomi, struktur sosial, dan opini publik.
c. Sumber pemerintahan, merupakan sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggung jawaban politik dan struktur dalam pemerintahan.
d. Sumber *idiosyncratic*, merupakan sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri.

Selain empat sumber di atas terdapat pula hirauan akan faktor ukuran wilayah negara dan ukuran jumlah penduduk, lokasi geografis, serta teknologi yang dapat terletak pada sumber sistemik atau masyarakat (Rosenau, 2006: 13).

2.1.5 Kebijakan Luar Negeri

Pada dasarnya kebijakan luar negeri merujuk pada fenomena proses di mana negara-negara berupaya memenuhi kepentingan nasionalnya dalam masyarakat global. Kebijakan luar negeri muncul sebagai suatu fenomena sosial karena setiap negara tidak dapat memenuhi sendiri seluruh kebutuhan-kebutuhan

sosial, politik, dan ekonominya bila hanya mengandalkan sumber daya yang terdapat di dalam teritorialnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah suatu negara pada umumnya akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tersebut di luar batas-batas wilayah teritorialnya atau dalam berhubungan dengan negara-negara lainnya pada arena internasional (Amstutz, 2013: 100).

Tindakan-tindakan eksternal negara tertuang dalam kebijakan luar negerinya meliputi berbagai macam jenis dan bentuk. Oleh karena itu, oleh beberapa ilmuwan, jenis dan bentuk tindakan eksternal suatiu negara dikonsepsikan ke dalam beberapa kategorisasi.

Rosenau dalam Perwita dan Yani mengkonsepsikan kebijakan luar negeri ke dalam tiga konsepsi, dimana satu sama lain saling terkait, yaitu:

1. Kebijakan luar negeri dalam pengertian seperangkat orientasi, yaitu berisikan seperangkat nilai-nilai ideal kebijakan luar negeri suatu negara yang menjadi panduan pelaksanaan kebijakan luar negeri negara yang bersangkutan. Orientasi ini merupakan hasil dari pengalaman sejarah dan persepsi masyarakat terhadap letak strategis negaranya dalam politik dunia.
2. Kebijakan luar negeri dalam pengertian strategi atau rencana atau komitmen untuk bertindak (*as a set of commitment and plans for action*), yang berisikan cara-cara dan sarana-sarana yang dianggap mampu menjawab hambatan dan tantangan dari lingkungan eksternalnya. Strategi suatu negara ini didasari dari orientasi kebijakan

luar negerinya, sebagai hasil interpretasi elit terhadap orientasi kebijakan luar negerinya dalam menghadapi berbagai situasi spesifik yang membutuhkan suatu strategi untuk menghadapi situasi tersebut.

3. Kebijakan luar negeri dalam pengertian bentuk perilaku (*as a form of behavior*), merupakan fase paling empiris dalam kebijakan luar negeri. Konsep ketiga ini merupakan langkah-langkah nyata yang diambil para pembuat keputusan dalam merespon kejadian dan situasi eksternal yang merupakan translasi dari orientasi dan artilukasi dari sasaran dan komitmen tertentu. Perilaku ini berbentuk baik tindakan-tindakan yang dilakukan maupun pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pemerintah. Perilaku kebijakan luar negeri merupakan implementasi strategi kebijakan luar negeri suatu negara dalam situasi tertentu.

Tindakan-tindakan kebijakan luar negeri pada hakekatnya merupakan teknik-teknik yang digunakan sebagai sarana pencapaian tujuan kaebijakan luar negeri yang ditetapkan dalam strategi kebijakan luar negeri. Tindakan kebijakan luar negeri ini dapat dibedakan berdasarkan teknik yang digunakannya. Menurut Holsti, tindakan kebijakan luar negeri dapat dibedakan menurut sarana yang digunakannya, yaitu:

1. Diplomasi, merupakan upaya pemerintah untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan nasionalnya, rasionalisasi kepentingan tersebut, ancaman, janji, dan kemungkinan kesepakatan-kesepakatan yang dapat diterima dalam suatu isu kepada pemerintah negara lain.

Diplomasi pada hakikatnya merupaka proses negosiasi dimana masing-masing pemerintah melakukan tawar-menawar dalam suatu isu tertentu demi mencapai kepentingan nasionalnya secara optimal melalui saluran-saluran resmi yang telah disepakati (Holsti, 2006: 89).

2. Propaganda, merupakan upaya-upaya pemerintah suatu negara untuk mempengaruhi perilaku dan opini publik asing atau negara lain sehingga sesuai dengan dengan yang diharapkan oleh pemerintah negara yang melakukan propaganda. Pemerintah berupaya mempengaruhi opini publik asing atau negara lain, dan atau kelompok etnik, religi, dan kelompok ekonomi tertentu dengan harapan bahwa publik ini pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku dan kebijakan pemerintahnya sesuai dengan harapan pemerintah negara yang melancarkan propaganda (Holsti, 2006: 142).
3. Ekonomi, merupakan upaya-upaya pemerintah untuk memanipulasi transaksi ekonomi internasional demi mencapai tujuan-tujuan nasionalnya. Bentuk manipulasi ini dapat berupa imbalan (*rewards*) maupun paksaan (*coercion*). Sebagai suatu sarana pemaksa, maka transaksi ekonomi internasional digunakan untuk memaksa pemerintah asing mengubah kebijakan-kebijakannya, baik domestik maupun luar negeri agar sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah yang melancarkan ancaman tersebut. Sedangkan sebagai sarana imbalan, maka transaksi ekonomi internasional digunakan untuk mendukung agar pemerintah asing melakukan atau terus

tindakan-tindakan yang diinginkan pemerintah yang melancarkan imbalan (Holsti, 2006: 174).

4. Militer, merupakan upaya-upaya pemerintah suatu negara untuk mempengaruhi perilaku dan kebijakan negara lain dengan menggunakan ancaman dan atau dukungan militer (Holsti, 2006: 152).

2.1.6 *Idiosyncratic*

2.1.6.1 Definisi *Idiosyncratic*

Dalam hubungan internasional individu memiliki peranan yang signifikan, dimana dalam studi hubungan internasional teoritisi memperhatikan perilaku individu, karena individu sebagai salah salah satu bagian dari pembuat keputusan atau kebijakan untuk mempengaruhi hasil dari politik luar negeri. Politik luar negeri merupakan suatu strategi untuk menghadapi politik internasional yang sedang berlangsung. Maka faktor individu ini akan mempengaruhi setiap kegiatan politik luar negeri dalam suatu negara.

Dan untuk membuat suatu kebijakan individu akan dipengaruhi oleh latar belakang, arus informasi yang diketahui, keinginan yang dimiliki serta tujuan yang hendak dicapai (*occasion for decision*) individu tersebut. Kuatnya pengaruh seorang individu dalam proses pembuatan keputusan, yang pada akhirnya memunculkan istilah *idiosyncratic* dalam politik luar negeri. Idiosyncratic mempelajari hal-hal yang mempengaruhi seorang individu dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh pada hubungan luar negeri.

Hal ini diperjelas dimana dalam keberadaan politik luar negeri *idiosyncratic* merupakan salah satu faktor penentu dalam keberadaan politik luar

negeri tersebut (Rosenau, 2006:15). Selain itu kategori dalam asumsi-asumsi dasar pengaruh juga menempatkan *idiosyncratic* sebagai salah satu kategorinya (Perwita & Yani, 2005:32).

Idiosyncratic merupakan penggabungan istilah yang terbentuk dari penggabungan kata *ideology* dan *syncratic* atau *syncratis*. Ideologi menurut Anthonio Gramsci adalah kerangka atau paradigma analisis untuk memahami dan menyelesaikan berbagai masalah. Dan yang dimaksud *syncratic* adalah perpaduan semua yang baik dari semua yang ada. *Idiosyncratic* dapat digunakan dalam analisa politik luar negeri suatu negara bila pengaruh yang dihasilkan oleh seorang individu dalam pembuatan kebijakan adalah total.

Secara umum *idiosyncratic* adalah semua aspek yang dimiliki oleh pembu3at keputusan, nilai, bakat, dan pengalaman sebelumnya yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan ataupun pengambilan kebijakan yang dilakukannya. Secara lebih singkat, Couloumbis dan Wolfe mendefinisikan faktor idiosyncratic sebagai salah satu variabel yang berkaitan dengan persepsi, citra (*image*), dan karakteristik pribadi individu pembuat keputusan.

Sedangkan idiosyncratic menurut H.C Warren adalah keseluruhan pengaturan mental seseorang pada tahap manapun dalam perkembangannya (Mas'oed dan McAndrews, 2012: 35). Ini meliputi fase-fase dari karakteristik manusia, intelektualitas, tempramen, keahlian moral, dan sikap yang telah dibangun dalam perjalanan hidup seseorang setelah memperhatikan perkembangan dalam fase-fase yang telah dibangun tersebut.

2.1.6.2 Karakteristik Kepribadian Dalam Politik Luar Negeri

Untuk mempelajari idiosyncratic maka perlu dipelajari kepribadian seseorang tersebut. Kepribadian seseorang sering kali diklasifikasikan menjadi tipe pribadi yang tertutup dan pribadi yang terbuka. Di sisi lain terdapat pula pengklasifikasian kepribadian berdasarkan tinggi rendahnya karakter dominasi seseorang. Oleh Etheredge ke dua klasifikasi tersebut dihubungkan sehingga dapat ditemukan karakteristik kepribadian yang dapat mempengaruhi politik luar negeri yaitu sebagai berikut:

1. *Block Leaders*

Merupakan gabungan antara kepribadian yang tertutup dan sangat mendominasi. Individu memiliki ciri ulet dan mendominasi pada satu sentral.

2. *World Leaders*

Merupakan gabungan antara kepribadian yang terbuka dan sangat mendominasi ciri-ciri dari pemimpin ini adalah kecenderungan mempergunakan kekuatan militer, fleksibel, dan pragmatis.

3. *Maintainers*

Merupakan gabungan antara kepribadian yang tertutup dan kurang mendominasi. Memiliki kecenderungan untuk mempertahankan status quo.

4. *Conciliators*

Merupakan gabungan antara kepribadian yang terbuka dan kurang mendominasi. Bercirikan penolong dan kurang konsisten (Amstutz, 2013: 89).

Kemudian diperjelas lagi oleh Margaret G. Hermann yang menggambarkan karakter kepribadian yang ada dalam masing-masing pemimpin negara didunia, yaitu:

a. Terlatih dalam urusan-urusan luar negeri (*training in foreign affairs*)

Terlatih disini dimaksudkan pada individu yang telah memegang posisi penting dalam politik atau pemerintahan yang akan memberikan pengetahuan tentang urusan-urusan luar negeri dan proses pembuatan keputusan.

b. Nasionalisme

Seberapa pengaruh keterkaitan emosi yang dimilikinya terhadap bangsanya, khususnya rasa cinta tanah air. Lebih lanjut adanya tekanan agar menegakkan kehormatan dan kedaulatan negaranya.

c. Percaya pada kemampuan sendiri untuk mengendalikan situasi (*believe in one's own ability to control events*)

Karakter ini melihat kemampuan individu dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat mengendalikan keadaan.

d. Kebutuhan akan kekuatan

Hal ini merujuk pada perhatian individu untuk mendirikan, memelihara atau mengembalikan kekuatan negaranya.

e. Kebutuhan akan persatuan

Konseptualisasi dari perhatian akan kebutuhan untuk hubungan kekerabatan dan persatuan yang damai.

f. *Conceptual complexity*

Tingkat perbedaan seseorang dalam menganalisa lingkungannya dimana masing-masing individu memiliki pandangan yang berbeda dalam mengamati suatu kejadian.

g. Rasa tidak percaya kepada orang lain

Karakter yang penuh dengan ketidakpercayaan atau rasa curiga yang diikuti dengan perasaan ragu, kesukaran, tidak ingin memberi dan ketakutan akan orang lain. Sehingga meningkatnya prasangka buruk dan ragu terhadap orang lain (Rudy, 2002: 97).

Karakteristik individu akan menghasilkan perbedaan pada orientasi individu tersebut terhadap kepribadian politik. Berdasarkan kerangka yang diuraikan, maka Hermann dalam Falkowski memberikan karakteristik pribadi yang merefleksikan kepribadian politik, yaitu :

1. *Expansionist*

Individu tidak ingin kehilangan kontrol. Mempunyai keinginan untuk memiliki kontrol yang besar (*high need for power*), memiliki kemampuan yang rendah dalam menyadari adanya beberapa alternatif pilihan pembuatan keputusan (*low conceptual complexity*) dan mempunyai ketidakpercayaan terhadap orang lain (*high distrust of others*). Namum individu yang berkarakter nasionalis mempunyai kehendak yang kuat dalam memelihara kedaulatan dan integrasi negara (*high nasionalism*). Individu tidak mementingkan arti hubungan pertemanan (*low need for affiliation*) dan memiliki tingkat inisiatif yang tinggi (*high believe in control over events*). Tipe ekspansionis ini menggunakan agresifitas dalam mewujudkan tujuannya.

2. *Active Independent*

Individu semacam ini memiliki keinginan besar untuk berpartisipasi dalam komunitas internasional tanpa membahayakan hubungan yang sudah terjalin dengan negara-negara lain. Individu akan berusaha mempertahankan kebebasan berusaha untuk menggalang hubungan sebanyak mungkin. Ciri-ciri dari individu yang termasuk golongan ini adalah *high nasionalism, high conceptual complexity, low distrust of others, high believe in own control, high need for affiliation, low need for power*.

3. *Influential*

Individu berusaha untuk menjadi pusat dari lingkungan, mempunyai kehendak dan hasrat untuk mempengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lain. Pemimpin dengan karakter seperti ini akan menciptakan bahwa tujuannnya adalah yang paling penting dibandingkan yang lain. Pemimpin negara akan bersikap protektif negara-negara yang menentangnya. Ciri-cirinya adalah *low nasionalism, low conceptual complexity, low distrust of others, high believe in own control, high need for affiliation, high need for power*.

4. Mediator

Karakter individu ini sering menyatukan perbedaan diantara negara dan memainkan peran "*go-between*". Pemimpin mendapatkan negara-negara sebagai perwujudan perdamaian dunia dan selalu mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dunia. Ciri-cirinya adalah "*low nasionalism", "high conceptual complexity", "low distrust of others", "high believe in own control", "high need for affiliation", "high need for power"*. Pada umumnya pemimpin seperti ini

senang berada dibelakang layar. Meskipun memberikan implikasi kepada negara lain namun menghindari intervensi.

5. Opportunis

Seseorang yang berusaha untuk tampil bijaksana, yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari keadaan yang dihadapi. Pemimpin seperti ini biasanya mengeluarkan kebijakan berdasarkan apa yang ia anggap perlu dan sedikit mengesampingkan komitmen ideologi. Ciri-cirinya adalah *low nasionalism, high conceptual complexity, low distrust of others, low believe in own control, low need for affiliation, low need for power*.

6. *Participative*

Mempunyai hasrat untuk memfasilitasi keterlibatan sebuah negara dalam arena internasional. Individu seperti ini tertarik untuk mencari yang berharga untuk negara dan mencari alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapi negara atau negara lain. Ciri-cirinya adalah *low nasionalism, high conceptual complexity, low distrust of others, low believe in own control, high need for affiliation, low need for power* (Surbakti, 2010: 20).

Menurut Baghat Korany, peranan individu di dalam proses pembuatan keputusan, khususnya dalam merumuskan politik luar negeri sangat nyata di negara berkembang. Dimana pendekatan psikologis merupakan faktor penentu untuk mengkaji politik luar negeri negara berkembang. Oleh karena itu maka faktor idiosyncratic seorang individu dalam hal ini pemimpin negara sangatlah berpengaruh pada perumusan politik luar negeri khususnya bagi negara berkembang (Korany, 2001: 8-9).

Menurut Rosenau, dari kelima faktor yang mempengaruhi politik luar negeri setiap negara akan ada selalu faktor yang lebih dominan dibandingkan faktor lainnya. Hal ini akan berbeda dengan bagi setiap negara tergantung dari kondisi geografis, yaitu ketersediaan sumber daya alam, kondisi perekonomian, serta status politik masing-masing negara.

Negara maju memiliki kecenderungan untuk menempatkan peran sebagai faktor yang paling berpengaruh dalam menentukkan keputusan luar negeri tersebut, sedangkan negara berkembang faktor idiosyncratic pembuat keputusan atau seorang pemimpin menjadi faktor penentu dalam menentukkan sikap politik luar negeri sebuah negara. Hal ini menurut Rosenau dikarenakan negara-negara berkembang cenderung memiliki hambatan lebih besar menyangkut birokrasi dibandingkan negara-negara maju (Rosenau. 2006: 132).

Pendekatan dari teori-teori diatas akan digunakan oleh penulis untuk menjelaskan prilaku Hugo Chavez terhadap hubungan luar negerinya dengan negara Amerika Serikat.

2.2 Kerangka Pemikiran

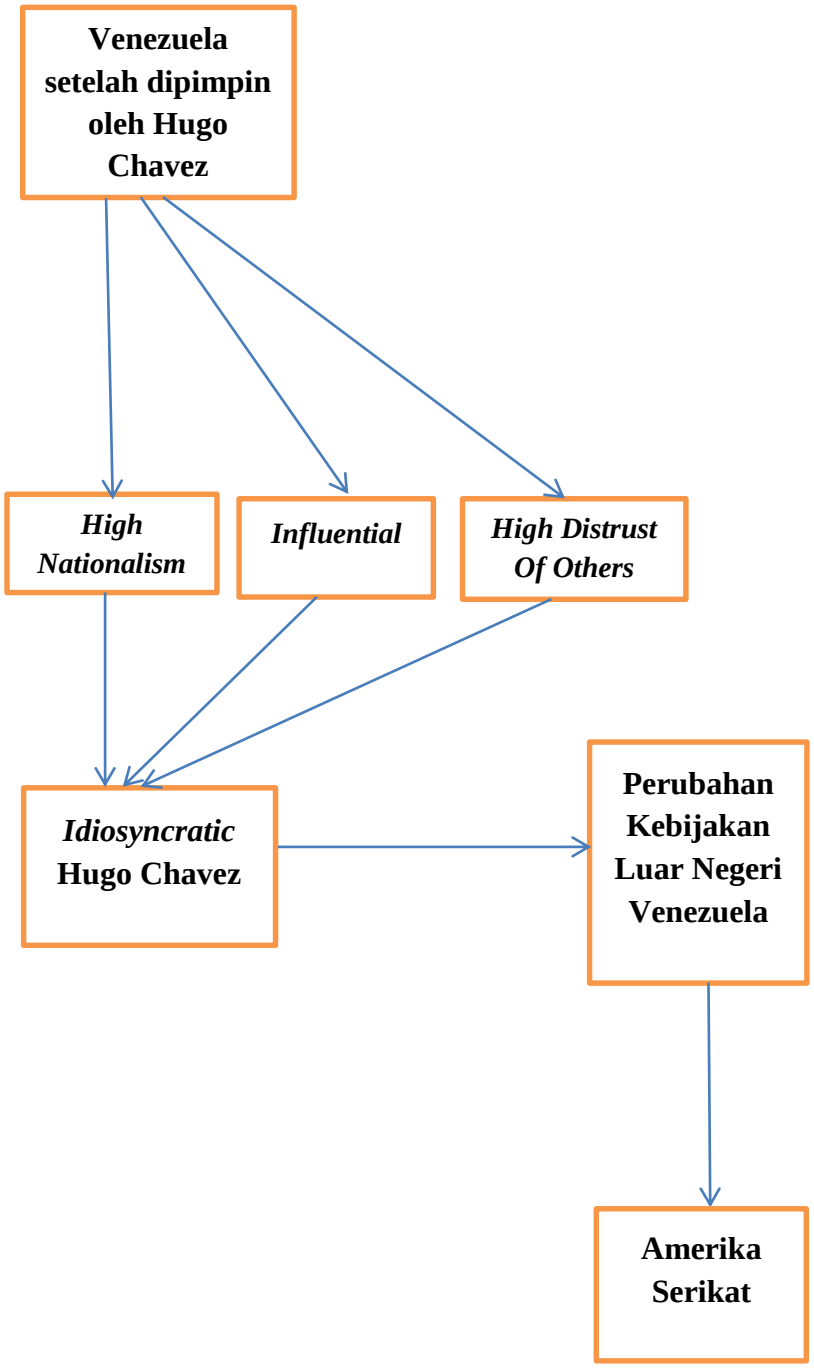
Hubungan antara Venezuela dan Amerika Serikat mengalami perubahan drastis sejak Hugo Chavez menduduki kursi kepresidenan di Venezuela pada tahun 2002. Sebelumnya, pada masa kepemimpinan Carlos Andrez Perez, Venezuela merupakan boneka yang sangat setia pada kepentingan ekonomi dan politik Amerika Serikat. Terbukti dari banyaknya perusahaan-perusahaan minyak multinasional asal Amerika Serikat dan negara-negara Barat sekutunya yang

menikmati hasil minyak Venezuela yang melimpah. Serta, Venezuela menjadi peminjam bantuan yang setia bagi IMF (*International Monetary Fund*) dan Bank Dunia (*World Bank*) (Carrol, 2013: 24).

Akan tetapi, sejak Hugo Chavez memegang posisi kepresidenan di Venezuela pada tahun 2002, semuanya berubah total. Venezuela menasionalisasi seluruh sumber daya tambang minyak di negaranya, sehingga 100% di bawah pengelolaan perusahaan minyak milik pemerintah Venezuela, yaitu PDVSA (Petroleos de Venezuela, S.A.). Venezuela juga melunasi seluruh hutang luar negerinya kepada IMF dan Bank Dunia (Pram, 2013: 16).

Bersama Kuba, Venezuela menjadi pelopor perlawanan terhadap hegemoni kapitalisme dan imperialisme Amerika Serikat, di tengah-tengah negara-negara Amerika Latin, yaitu Bolivia (dipimpin Evo Moralez), Ekuador (dipimpin Raphael Correa), Brazil (dipimpin Luiz Inacio Lula da Silva), Nikaragua (dipimpin Daniel Ortega), Uruguay (dipimpin Jose Mujica), dan Paraguay (dipimpin Fernando Lugo) (Pram, 2013: 23).

Dan ini semua sangat dipengaruhi oleh faktor *idiosyncratic* dari sang presiden, yaitu Hugo Chavez itu sendiri.



Gambar 2.1

Alur Kerangka Pemikiran